



4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Murni	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	93,16	95,68	97,71	98,76	97,36	99,98
SLTP/MTs (%)	69,81	64,36	72,91	67,63	71,33	72,72
SLTA/MA/SMK (%)	32,69	44,62	62,05	44,32	48,31	48,73

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan BPS Indonesia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APM di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI dan APM terendah pada jenjang SLTA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah siswa yang masih sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Murni	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	93,16	96,74	97,44	97,75	98,05	98,45
SLTP/MTs (%)	66,94	69,57	72,40	72,51	72,70	73,37
SLTA/MA/SMK (%)	49,39	50,05	55,04	55,58	55,91	57,15

Sumber: www.kalsel.bps.go.id dan BPS Indonesia

APM Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APM Kabupaten Tapin untuk semua jenjang pendidikan selama periode tahun 2012-2017. APM Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM



Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa tahun dan jenjang pendidikan tertentu. Uraian APM Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- ✓ APM SD/MI untuk tahun 2014 dan 2015;
- ✓ APM SLTP/MTs untuk 2014;
- ✓ APM SLTA/SMK/MA untuk tahun 2014.

Tabel 2.47
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Murni	2015	2016	2017
SD/MI (%)	98,76	97,36	99,98
Laki-laki	99,11	96,97	99,98
Perempuan	98,37	97,83	99,98
SLTP/MTs (%)	67,63	71,33	72,72
Laki-laki	59,37	64,76	74,00
Perempuan	74,80	80,56	71,51
SLTA/MA/SMK (%)	44,32	48,31	48,73
Laki-laki	44,64	46,05	47,65
Perempuan	44,02	50,05	49,60

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenis Kelamin Laki-laki mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK, dan mengalami mengalami fluktuasi pada jenjang Pendidikan SD/MI. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi pada semua jenjang Pendidikan.

2.4.2 Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi (AKB)).



Berikut ini akan ditampilkan AKHB dan AKB selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
AKB	17,8	20	23	18	17
AKHB	982,2	980	977	972	973

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2016

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi mengalami fluktuasi naik turun selama periode 2012-2016. AKHB terendah di tahun 2015 sebesar 977, sedangkan AKHB tertinggi di tahun 2013 sebesar 982.2.

2. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Tabel 2.49
Jumlah Posyandu dan Balita
di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu	211	194	194	194	194
2	Jumlah Balita	12,852	18,015	18,132	18,007	17,799
3	Rasio	16,42	10,77	10,70	10,77	10,90

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017



3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu dalam kurun waktu tahun 2012-2016 tidak mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2012 sampai tahun 2017, tidak difasilitasi dengan adanya peningkatan dalam jumlah puskesmas yang jumlahnya tetap tiap tahun.

Tabel 2.50
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah Pustu	47	36	37	37	37	37
3	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186.672
4	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,270	0,204	0,207	0,204	0,201	0,198

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Data menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2013 ke 2016, tidak disertai dengan adanya peningkatan rumah sakit yang jumlahnya tetap tiap tahun.

Tabel 2.51
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah					
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI					
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah					
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1
6	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
7	Rasio	0,0058	0,0057	0,0056	0,0055	0,0054

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017



Berdasarkan tabel di atas rasio rumah sakit per satuan penduduk terus mengalami penurunan dari 0.0058 di tahun 2012 menjadi 0.0054 di tahun 2016.

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menerangkan ketersediaan dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tapin terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter	21	13	23	23	21	27
2	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672
3	Rasio	0,121	0,074	0,128	0,127	0,114	0,145

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Berdasarkan tabel di atas rasio dokter per satuan penduduk terendah di tahun 2013 sebesar 0.074 dan tertinggi di tahun 2017 sebesar 0,145.

Tabel 2.53
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Binuang	30.910	1	0.032
2	Hatungun	8.909	2	0.224
3	Tapin Selatan	20.343	1	0.049
4	Salam Babaris	12.298	2	0.163
5	Tapin Tengah	19,173	2	0.104
6	Bungur	13.316	1	0.075
7	Piani	5.965	1	0.168
8	Lokpaikat	9.974	2	0.201
9	Tapin Utara	25.788	10	0.388
10	Bakarangan	9.491	2	0.211
11	Candi Laras Selatan	13.076	2	0.153
12	Candi Laras Utara	17.429	1	0.057
	JUMLAH	186,672	27	0.145

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017, 2018



Berdasarkan tabel rasio dokter di atas menunjukkan bahwa profesi dokter di Kabupaten Tapin masih sangat jarang. Adanya peningkatan jumlah penduduk, tidak didukung dengan jumlah dokter yang tersedia. Untuk tingkat kecamatan, rasio terendah berada di Kecamatan Tapin Selatan sebesar 0,050, dan rasio tertinggi berada di Kecamatan Candi Laras Selatan.

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menerangkan ketersediaan tenaga medis untuk setiap 1.000 penduduk, seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Tenaga Medis
di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga Medis	565	507	541	541	544	635
2	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672
3	Rasio	3,25	2,87	3,02	2,98	2,95	3,40

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Sedangkan jumlah tenaga medis yang tersebar di seluruh kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	Binuang	30.910	75	2.426
2	Hatungun	8.909	45	5.051
3	Tapin Selatan	20.343	34	1.671
4	Salam Babaris	12.298	11	0.894
5	Tapin Tengah	19,173	58	3.025
6	Bungur	13.316	44	3.304
7	Piani	5.965	31	5.197
8	Lokpaikat	9.974	28	2.807
9	Tapin Utara	25.788	180	6.980
10	Bakarangan	9.491	31	3.266
11	Candi Laras Selatan	13.076	30	2.294



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
12	Candi Laras Utara	17.429	68	3.902
		186,672	635	3.402

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

2.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tapin juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Proporsi jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya.

Kondisi jalan di Kabupaten Tapin dibedakan atas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Pembagian jalan tersebut dibedakan atas kewenangannya. Berikut ini adalah data proporsi panjang jaringan jalan di Kabupaten Tapin. Panjang jaringan jalan kabupaten meningkat dari 505,07 km di tahun 2012 menjadi 617,15 km di tahun 2015. Dari 617,15 km panjang jaringan jalan pada Tahun 2017, yang memiliki kondisi baik sebanyak 275,82 km. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 307,08 km. Sementara jalan dalam kondisi sedang pada Tahun 2017 juga mengalami penurunan dari 72,99 km pada Tahun 2016 menjadi 59,39 km pada Tahun 2107. Hal yang sama terjadi juga untuk ruas jalan dalam kondisi rusak.

Tabel 2.56
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik	282,8	162,27	266,45	300,98	307,08	275,82
2	Kondisi Sedang	64,4	194,62	66,80	73,49	72,99	59,39
3	Kondisi Rusak	88,07	70,80	92,68	168,52	165,80	100,92
4	Kondisi Rusak Berat	68,0	155,78	191,22	74,15	71,28	181,02
5	Total Jalan	505,07	584,18	617,15	617,15	617,15	617,15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018



Dengan panjang jalan yang tidak bertambah sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2107, terlihat bahwa komposisi jalan dalam kondisi rusak berat mengalami kecenderungan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan ruas jalan dengan kondisi rusak berat pada Tahun 2017 meningkat drastis dari 71,28 km pada Tahun 2016 menjadi 181,02 km pada Tahun 2017. Kondisi ini sangat dipengaruhi dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas untuk pemeliharaan jalan.

Tabel 2.57
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Jenis Jalan Dalam Kondisi Baik		Persentase					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jalan Kabupaten ¹	53 %	28 %	43,17%	48,77%	49,76 %	44,69 %
2	Jalan Provinsi	56,77%	56,77%	56,77%	63,61%	63,61%	
3	Jalan Nasional	95,29%	95,29%	95,29%	76,74%	76,74%	

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

¹Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik hanya 49,76 persen dan menurun menjadi 44,69 persen pada tahun berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin karena sangat menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 53 persen. Sementara untuk jalan provinsi mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Namun untuk jalan nasional cenderung menurun dan stagnan pada Tahun 2015 dan 2016.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Setelah jaringan jalan, berikutnya adalah pelayanan umum pada jaringan irigasi. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik cenderung meningkat dan stagnan pada angka 65 persen. Data Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.58
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Tapin 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	82,63	46,00	65,00	65,00

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Akses air minum merupakan kebutuhan primer masyarakat. Semakin tinggi akses penduduk terhadap air minum maka semakin baik tingkat pelayanan daerah terhadap kebutuhan primer masyarakat. Berdasarkan pada tabel dibawah, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih masih sebesar 55,48% di tahun 2016.

Berikut ini adalah data persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Tapin.

Tabel 2.59
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	13.430	15.037	15.037	28.017
2	Jumlah rumah tangga	47.826	45.980	45.980	50.343
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	40,00	32,70	32,70	55,48

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Selama periode tahun 2013-2016, persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami fluktuasi. Tahun 2014 menyentuh posisi paling rendah yaitu 29,69 persen dan meningkat menjadi 62,76 persen pada tahun 2015. Posisi Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi pada Tahun 2016 sebesar 55,48 persen. Kondisi rumah tinggal yang bersanitasi di Kabupaten Tapin pada periode 2012 sampai 2016 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.60
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Kabupaten Tapin 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Rumah Tangga Per Sanitasi	56,00	29,69	62,76	55,48

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Dapat dilihat fasilitas tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sebagai berikut.

Tabel 2.61
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	-	0,48	0,79	0,81	1,17

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan selama periode tahun 2012-2016. Rasio sebesar 0,48 di tahun 2013 dan sebesar 1,17 di tahun 2016.

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Dalam urusan penataan ruang, aspek pelayanan umum dapat dilihat dari kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan luas wilayah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	11,00	11,00	29,96	29,96

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



Berdasarkan tabel di atas rasio RTH per satuan wilayah mengalami peningkatan selama periode tahun 2012-2016. Rasio sebesar 11,00 persen di tahun 2013, dan sebesar 29.96 persen di tahun 2016.

2.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah rumah layak huni.

Tabel 2.63
Persentase Rumah Layak Huni
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Rumah Layak Huni	-	90,00	91,57	92,23	97,18

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah layak huni terus menerus mengalami peningkatan. Persentase rumah layak huni sebesar 90,00 persen di tahun 2013, dan sebesar 97,18 persen di tahun 2016.

Tabel 2.64
Persentase Lingkungan Kumuh
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Lingkungan Permukiman Kumuh	6,27	0,24	0,0068	0,0067

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, persentase lingkungan kumuh terus mengalami penurunan.



2.4.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.65
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah polisi pamong praja	79	73	106	105	105
2	Jumlah penduduk	173.869	176,468	179,166	181,778	184,330
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4,53	4.14	5.92	5.78	5.70

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas penda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.



Tabel 2.66
Rasio Jumlah Linmas
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Linmas	328	330	304	310	310
2	Jumlah penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	18,83	18,70	16,97	17,05	16,82

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, rasio jumlah linmas berfluktuasi selama periode tahun 2012-2016. Rasio terendah sebesar 16,82 di tahun 2016, dan rasio tertinggi sebesar 18,83 di tahun 2012.

2.4.6 Sosial

1. Sarana sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Tapin dari tahun 2012-2016 memiliki jumlah yang sama, yaitu 8 unit.

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.67
PMKS Penerima Bantuan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS penerima bantuan	208	870	906	2,108	4,389

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2012 sebanyak 208 orang PMKS yang memperoleh bantuan dan jumlah ini meningkat menjadi 4.389 pada tahun 2016.



B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.7 Tenaga Kerja

1. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tabel 2.68
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	12,21	30,24	48,41	49,00

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun Tahun 2016

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terus mengalami peningkatan dari 12,21 persen di tahun 2013 menjadi 49 persen di tahun 2016. Ini menunjukkan makin banyak pencari kerja di Kabupaten Tapin yang memperoleh pekerjaan.

2. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan tingkat sarjana.



Tabel 2.69
Rasio Lulusan Sarjana
di Kabupaten Tapin Tahun 2015

NO	Uraian	2015
1	Jumlah lulusan Sarjana Muda	1,985
2	Jumlah lulusan Sarjana Lengkap	5,098
3	Jumlah lulusan Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap	7,083
4	Jumlah penduduk	181,778
5	Rasio lulusan (3/4)	3,90

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

2.4.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan jumlah perempuan yang berada di lembaga pemerintahan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	-	10,41	11,18	11,17	9,43

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami fluktuasi. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terendah di tahun 2016 yaitu 9,43 persen, dan persentase tertinggi di tahun 2014 yaitu 11,8 persen.



2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut rasio KDRT mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2016. Rasio KDRT tertinggi sebesar 0,022 di tahun 2015, sedangkan terendah sebesar 0,010 di tahun 2016.

Tabel 2.71
Rasio KDRT Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KDRT	-	6	1	10	5
2	Jumlah Rumah Tangga	-	47,826	45,980	45,980	50,343
3	Rasio KDRT	-	0,013	0,002	0,022	0,010

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2016, 2017

2.4.9 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Dalam hal urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tapin mengukur kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan pangan utama di masyarakat. Berikut adalah data pangan utama di Kabupaten Tapin tahun 2012-2016.

Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Ketersediaan pangan utama (ton)	158,544	154,135	201,662	201,662	278,582
2	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
3	Persentase	91,19	87,34	112,56	110,94	151,13

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



Persentase ketersediaan pangan utama selama tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi sebesar 151,13 persen di tahun 2016, sedangkan terendah sebesar 87,34 persen di tahun 2013.

2.4.10 Pertanian

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanian ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.73
Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lahan Bersertifikat	-	0,40	0,85	0,85	1,17

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



2.4.11 Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan data, terlihat bahwa penanganan sampah di Tapin semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan capaian persentase penanganan sampah yang tertangani, dan pada tahun 2016 mencapai 47,18 persen. Namun walaupun menunjukkan peningkatan, masih perlu ditingkatkan dan mejadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Penanganan sampah di Kabupaten Tapin selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Penanganan Sampah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Penanganan Sampah	-	19,21	20,28	42,00	47,18

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial, dan ekonomi.

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



Tabel 2.75
Persentase Kepemilikan KTP
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Kepemilikan KTP	-	86,68	85,07	85,07	94,00

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan data di atas, kepemilikan KTP masih berfluktuasi dengan persentase tertinggi 94,00 persen di tahun 2016. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tapin agar kepemilikan KTP dapat ditingkatkan dan mencapai angka 100 persen.

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Berdasarkan data yang ada, kepemilikan akta lahir di Tapin masih sangat kecil sekali dengan persentase tertinggi sebesar 36,04 persen di tahun 2014 dan 2015. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tapin agar kepemilikan akta lahir dapat ditingkatkan.

Tabel 2.76
Persentase Kepemilikan Akte Lahir
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	-	26,40	36,04	36,04	34,67

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Tabel 2.77
Persentase Anak Berumur di bawah 18 Tahun menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Memiliki Akta Kelahiran	71,89	73,00	81,89
Laki-laki		37,52	42,37
Perempuan		35,48	39,52
Tidak Memiliki Akta Kelahiran	28,11	27,00	18,11



Indikator	2015	2016	2017
Laki-laki		12,91	9,40
Perempuan		14,09	8,71

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, Kepemilikan Akta Kelahiran baik pada jenis kelamin laki-laki maupun pada jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan ditahun 2015 samapi dengan tahun 2017.

2.4.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tabel 2.78
Persentase PKK Aktif
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2. Persentase LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.



Tabel 2.79
Jumlah LSM
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah LSM	-	5	8	3	3

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

2.4.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Berikut ini adalah tabel rasio akseptor KB.

Tabel 2.80
Rasio Akseptor KB
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

Indikator	2013	2014	2015	2016
Persentase PUS yang aktif ber -KB	84,71	87,68	87,64	82,43

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio akseptor KB semakin menurun. Kondisi ini menandakan kurang berfungsinya para penggiat Keluarga Berencana.

2.4.15 Perhubungan

1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal



penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

Tabel 2.81
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	2	2	2	2	2
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada penambahan sarana dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Selama tahun 2012 sampai dengan 2016 jumlah terminal bis tetap yaitu 2 unit.

2. Angkutan Darat

Di dalam hal angkutan darat akan ditunjukkan persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Persentase Angkutan Darat
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

URAIAN	2013	2014	2015	2016
Persentase Angkutan Darat	11,35	11,38	15,64	2,28

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang



ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji Kir.

Pengujian kir angkutan umum di Kabupaten Tapin terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

No	Jenis	2013	2014	2015	2016
1	Mobil barang				
	Umum	616	616	805	723
	Tidak Umum	1,295	1,295	1,509	1,470
	Dinas	13	13	15	14
2	Mobil Bus				
	Umum	1	1	0	8
	Tidak Umum	22	22	35	31
	Dinas	4	4	1	5
3	Mobil Penumpang				
	Umum	43	43	38	30
	Tidak Umum	0	0	1	0
	Dinas	0	0	0	0
	Total	1.951	1.951	2.365	2.281

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

2.4.16 Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.84
Jaringan Komunikasi
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemancar telepon genggam	3	32	32	32	32
2	Pemancar telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total Pemancar Komunikasi (1+2)	4	33	33	33	33

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	3	0	0	0
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	5	6	9	6
3	Total jenis surat kabar (1+2)	8	8	6	9	6

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.86
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	2	2	2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	0	0	0	0	0
3	Jumlah penyiaran TV local	1	1	1	1	1
4	Jumlah penyiaran TV nasional	4	10	10	10	10
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	7	13	13	13	13

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) indikatornya dapat dilihat dari persentase koperasi yang aktif.

Tabel 2.87
Persentase Koperasi Aktif
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	115	116	116	116	116
2	Jumlah koperasi	141	142	142	142	142
3	Persentase koperasi aktif	81,56	81,69	81,69	81,69	81,69

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Berdasarkan tabel di atas, selama periode tahun 2012-2016 tren jumlah koperasi yang aktif tetap stabil setiap tahunnya. Koperasi aktif yang stagnan di 81,69 persen perlu dicari suatu cara agar bisa mencapai tingkat keaktifan 100 persen di masa yang akan datang.

2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah UKM non BPR/LKM di Tapin terus mengalami kenaikan selama periode tahun 2012-2016. Perkembangan jumlah jumlah UKM non BPR/LKM, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.88
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun
di Kabupaten Tapin 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	7,405	7,521	7,616	7,737	7,941

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

3. Jumlah BPR/LKM

Berdasarkan data dari SIPD Kabupaten Tapin, jumlah BPR/LKM tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2013-2016 yaitu sebanyak 12 BPR dan LKM. Sementara LKM yang berjumlah 3 unit pada Tahun 2012 pada tahun-tahun berikutnya tidak terbentuk lagi atau 0. Jumlah BPR/LKM dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Jumlah BPR/LKM
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah BPR	5	12	12	12	12
2	Jumlah LKM	3	0	0	0	0
3	Jumlah BPR dan LKM	8	12	12	12	12

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.18 Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016), jumlah investor mengalami fluktuasi. Jumlah PMDN yang semula berjumlah 18 pada tahun 2012 mengalami penurunan pada Tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 12 investor. Sedangkan untuk PMS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan terakhir pada tahun 2015 sejumlah 18 investor. Berikut ini disajikan jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Tapin.



Tabel 2.90
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2016

Tahun	PMDN	PMA	Total
2012	18	0	18
2013	2	5	7
2014	2	5	7
2015	12	18	30
2016	-	-	-

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Kabupaten Tapin merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan adanya investasi dalam negeri maupun dari asing agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Data tiga tahun mulai tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan bahwa nilai PMA sama yaitu US\$ 80.812,80. Sedangkan nilai PMDN mengalami kecenderungan penurunan yaitu dari Tahun 2012 sebesar Rp 569,553,000,000.00 menjadi Rp 313,271,843,891.00 pada tahun 2013 dan 2014. Data investasi tahun 2012-2014 di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2014

Tahun	Nilai Investasi	
	PMA	PMDN
2012	-	IDR 569,553,000,000.00
2013	US\$ 80.812,80	IDR 313,271,843,891.00
2014	US\$ 80.812,80	IDR 313,271,843,891.00

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.19 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan,



untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Tabel 2.92
Jumlah Organisasi Pemuda
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Organisasi Pemuda	12	43	43	43	43

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi olahraga dapat disusun tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.93
Jumlah Organisasi Olahraga
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Organisasi Olahraga	145	35	35	35	35

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau "*event*" kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan kepemudaan dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 2.94
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	12	10	10	10	10

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau "*event*" olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Jumlah kegiatan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.95
Jumlah Kegiatan Olahraga
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kegiatan Olahraga	65	29	29	29	29

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.20 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Tapin, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

1. Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Tapin terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

2. Buku PDRB Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Tapin, BPS Kabupaten Tapin mengeluarkan secara